

SKRIPSI

Lia Herawati

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU DI PERUM PEGADAIAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WAKTU TERTENTU DI PERUM PEGADAIAN

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS AKHIR UNTUK MEMENUHI
SYARAT PENCAPAIAN GELAR SARJANA HUKUM

PEMBIMBING,



LANNY RAMLI, S.H., M.Hum
NIP. 131 878 388

PENULIS,



LIA HERAWATI
NIM. 039614408

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 15 Agustus 2000**

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Machsoen Ali, SH., M.S.

2. Anggota . Lanny Ramly, S.H., M.Hum

R. Indiarso, S.H.

Dr. Maarten Landert Souhoka, S.H., M.S.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Timbulnya hubungan kerja di Perum Pegadaian dimulai dengan adanya perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja merupakan sarana untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja waktu tertentu. Perjanjian kerja di lingkungan Perum Pegadaian dibuat secara sepihak, dimana pekerja waktu tertentu hanya tinggal menandatangani saja sebagai tanda persetujuan. Perjanjian kerja di Lingkungan Perum Pegadaian tersebut lebih menguntungkan perusahaan daripada pekerjanya.
- b. Perlindungan terhadap jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja waktu tertentu di lingkungan Perum Pegadaian hanya perlindungan terhadap pemeliharaan kesehatan. Karena resiko pekerjaan di lingkungan Perum Pegadaian yang tidak terlalu besar untuk dapat mengalami kecelakaan sampai yang berakibat kematian, maka, jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua tidak diadakan. Pembayaran premi asuransi ASKES hanya disubsidi oleh perusahaan sebesar 50% saja dan sisanya ditanggung oleh sendiri oleh peserta ASKES. Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Perum Pegadaian menurut saya masih kurang, peserta ASKES hanya berlaku bagi pekerja waktu tertentu saja tidak dengan

keluarganya. Sedangkan perlindungan pemutusan hubungan kerja di Perum Pegadaian dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan alasan bahwa tugas dan pekerjaan pekerja waktu tertentu tersebut telah selesai atau dapat dianggap selesai. Selain itu dalam perjanjian kerja ataupun dalam peraturan, pengangkatan, pemberhentian dan penghasilan pegawai waktu tertentu (tidak tetap) tidak dinyatakan dengan jelas mengenai pesangon, uang jasa, dan ganti rugi.

2. Saran

- a. Dalam membuat perjanjian sebaiknya pekerja diikutsertakan agar para pihak saling diuntungkan haknya dan kewajibannya serta pelanggaran terhadap isi perjanjian juga dapat dihindari karena para pihak telah mengerti dengan cermat isi perjanjian tersebut.
- b. Ketika akan berakhirnya waktu perjanjian kerja tersebut dapat menimbulkan rasa resah dan cemas dari pekerja waktu tertentu tersebut, mereka menjadi bertanya-tanya pada diri sendiri apakah perjanjian kerja tersebut diperpanjang ataukah tidak. Sebaiknya jika pekerja waktu tertentu tersebut telah bekerja lebih dari 3 (tiga) dapat diangkat secara langsung menjadi pekerja waktu tidak tertentu, sesuai dengan PERMENAKAER No. PER-02/MEN/1993.

- c. Sebaiknya seluruh anggota keluarga pekerja waktu tertentu tersebut dimasukkan menjadi peserta ASKES sehingga kesejahteraan dan kesehatan keluarga lebih terjamin. Dengan terjamin kesejahteraan keluarga maka kesehatan keluarga

